



STRATEGI DISPAREKRAF DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA LEBAKMUNCANG KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG

Rangga Hidayat¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan, belum optimalnya pemahaman Pokdarwis terhadap strategi pengembangan desa wisata, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi pasif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, dengan informan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Desa, Pokdarwis, serta masyarakat. Analisis data menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap formulasi, strategi telah disusun berdasarkan regulasi dan potensi lokal, namun partisipasi masyarakat belum merata. Pada tahap implementasi, pengembangan atraksi wisata, homestay, dan UMKM telah berjalan, tetapi masih terkendala keterbatasan SDM, modal, dan sarana prasarana. Pada tahap evaluasi, monitoring telah dilakukan, namun belum didukung mekanisme evaluasi partisipatif yang sistematis untuk menjamin keberlanjutan desa wisata.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Lebakmuncang.

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Bandung Regency Tourism and Creative Economy Office in developing Lebakmuncang Tourism Village, Ciwidey District. The study is motivated by weak coordination among institutions and stakeholders, limited understanding of Pokdarwis regarding tourism village development strategies, as well as constraints in human resources and supporting infrastructure. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through passive observation, semi-structured interviews, and documentation studies, involving informants from the Tourism and Creative Economy Office, village government, Pokdarwis, and local communities. Data analysis was conducted using Fred R.

David's strategic management framework, which includes strategy formulation, implementation, and evaluation. The findings indicate that in the formulation stage, strategies have been developed based on regulations and local potential; however, community participation remains uneven. In the implementation stage, the development of tourism attractions, homestays, and MSMEs has progressed, but is still constrained by limited human resources, capital, and infrastructure. In the evaluation stage, monitoring has been conducted, yet it lacks a systematic participatory evaluation mechanism to ensure the sustainability of the tourism village.

Keywords: Government Strategy, Tourism Village, Community Empowerment, Lebakmuncang.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan potensi pariwisata, baik wisata alam maupun budaya, yang didukung oleh keberagaman suku, adat istiadat, kebudayaan, serta kondisi geografis tropis yang menghasilkan keindahan alam dan keanekaragaman hayati (Deki, 2019).

Pengembangan sektor pariwisata sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa negara di luar sektor migas. Pariwisata diharapkan mampu menarik wisatawan nusantara dan mancanegara, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memberikan manfaat ekonomi, pariwisata juga berperan dalam memperluas wawasan masyarakat melalui interaksi sosial dan budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Keberadaan pariwisata memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Dampak tersebut antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, serta berkembangnya sarana dan prasarana pendukung seperti transportasi, penginapan, dan fasilitas usaha pariwisata. Interaksi langsung antara masyarakat lokal dan wisatawan juga mendorong peningkatan pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap perkembangan dunia luar (Yakup & Haryanto, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung sebagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah, semakin lengkap sarana dan prasarana yang memadai semakin menarik untuk di kunjungi. Sektor pariwisata adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia terlebih lagi Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting mengingat di Indonesia sangat banyak tempat atau sektor wisata”

Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan bagian dari Pembangunan daerah secara keseluruhan, yang dimana harapan dapat memberikan dampak positif seperti terbukanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat serta dapat mengarahkan kegiatan yang positif bagi masyarakat dan generasi muda yang ada di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian, industri kecil dan menengah, serta pariwisata berbasis alam dan budaya sebagai pilar pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung mengusung visi pembangunan “BEDAS” (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) yang diwujudkan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan ke Desa Wisatawan Lebakmuncang 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2020	17
2.	2021	85
3.	2022	100
4.	2023	1.520
5.	2024	1.740
Total		3.174 Pengunjung

Sumber: Pemerintah Desa Lebakmuncang Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan data jumlah pengunjung Desa Wisata Lebakmuncang

dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung tercatat hanya sebanyak 17 orang, kemudian meningkat lebih dari empat kali lipat menjadi 85 orang pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah pengunjung mencapai 100 orang. Lonjakan paling drastis terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah pengunjung melonjak tajam menjadi 1.520 orang. Kecenderungan peningkatan ini terus berlanjut di tahun 2024 dengan total 1.740 pengunjung, menandakan pertumbuhan minat masyarakat terhadap destinasi wisata ini.

Secara keseluruhan, selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 3.174 orang. Data ini mencerminkan bahwa strategi pengembangan dan promosi desa wisata yang dilakukan telah memberikan dampak yang nyata dalam menarik minat wisatawan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fajar Giri Pratama & Kurnia, 2018) menyoroti strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang dengan pendekatan partisipatif masyarakat. Melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi desa dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026, pengembangan desa wisata dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu pengembangan destinasi unggulan dan desa wisata, pemberdayaan sumber daya manusia dan pelaku wisata, digitalisasi dan promosi pariwisata, penyelenggaraan event dan kalender wisata, penguatan kolaborasi dan kemitraan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Salah satu desa wisata yang dikembangkan adalah Desa Wisata Lebakmuncang yang terletak di Kecamatan Ciwidey. Desa ini menawarkan

perpaduan antara wisata alam, edukasi, dan budaya lokal melalui berbagai aktivitas seperti wisata pertanian, edukasi kopi, homestay, serta seni budaya masyarakat. Data kunjungan wisatawan pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan total kunjungan mencapai 3.174 orang, yang menandakan meningkatnya minat wisatawan terhadap Desa Wisata Lebakmuncang (Siregar dkk., 2020).

Meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat, pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang peneliti gunakan ada metode penelitian kualitatif bersifat induktif. Menurut (Meloeng, 2018) "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah".

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini dengan maksud mengungkapkan, menelaah dan menganalisis permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi dan berdasarkan pada fakta dalam objek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang

Pembahasan ini menganalisis strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, dengan menggunakan kerangka teori manajemen strategi Fred R. David yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Kerangka ini dipilih karena mampu memberikan perspektif analitis yang komprehensif dalam menilai proses perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas strategi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lokasi penelitian, serta telaah terhadap dokumen kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola strategi, bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan, tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan yang memengaruhi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Pembahasan disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil analisis, sehingga tidak hanya menyajikan deskripsi empiris, tetapi juga pemaknaan yang relevan dengan konteks penelitian.

2. Formulasi Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah memiliki dasar kebijakan yang jelas dan terarah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menjadikan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai landasan utama dalam merumuskan arah pengembangan desa wisata. Kebijakan tersebut kemudian diadaptasi dengan kondisi, karakteristik, serta potensi lokal Desa Lebakmuncang, sehingga strategi yang dirumuskan tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual dan berbasis keunggulan lokal.

Formulasi strategi juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam pengelolaan potensi wisata, baik dalam pengembangan atraksi wisata, pelestarian budaya lokal, maupun penguatan usaha wisata dan UMKM. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan sebagai fasilitator dan pendamping melalui penyediaan pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan promosi, dengan tujuan mendorong kemandirian dan keberlanjutan desa wisata.

Tujuan jangka panjang pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang menunjukkan adanya keselarasan visi antar pemangku kepentingan. Pemerintah Desa Lebakmuncang menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, pemberdayaan warga, serta pembangunan infrastruktur pendukung yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, Pokdarwis memiliki visi menjadikan Desa Wisata Lebakmuncang sebagai desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan, mampu memberikan manfaat ekonomi secara konsisten, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta mendorong keterlibatan generasi muda tanpa mengabaikan pelestarian alam dan budaya sebagai daya tarik utama.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan perumusan strategi masih belum merata. Sebagian masyarakat terlibat secara aktif melalui forum musyawarah desa, rapat, dan diskusi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan Pokdarwis, sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan sesuai kondisi lapangan. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang keterlibatannya bersifat tidak langsung melalui perwakilan RT atau tokoh masyarakat, bahkan lebih banyak menerima informasi mengenai rencana yang telah disusun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan partisipatif telah menjadi bagian dari formulasi strategi, upaya peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh masih diperlukan agar strategi yang dirumuskan benar-benar

merepresentasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Desa Lebakmuncang.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang merupakan tahapan penerjemahan kebijakan dan rencana strategis ke dalam tindakan nyata di lapangan. Mengacu pada teori manajemen strategi Fred R. David, tahap implementasi menuntut adanya penetapan tujuan operasional, pembagian peran yang jelas, alokasi sumber daya, serta koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kepemimpinan, komunikasi, dan partisipasi aktor yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata desa, mulai dari pengelolaan atraksi wisata berbasis alam dan budaya, penyediaan homestay, pengelolaan kuliner dan kerajinan lokal, hingga menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Keterlibatan masyarakat ini difasilitasi melalui kelembagaan lokal, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Pendekatan ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap desa wisata, yang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Dalam pelaksanaan strategi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung menjalankan peran sebagai fasilitator, koordinator, dan pendamping. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup pendampingan dalam perencanaan program, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi destinasi desa wisata. Pola ini menunjukkan bahwa dinas tidak bersifat dominan dalam pengelolaan desa wisata, melainkan mendorong kemandirian desa agar mampu mengelola potensi wisatanya secara berkelanjutan.

Implementasi strategi juga ditandai dengan adanya pembagian peran yang relatif jelas antar pemangku kepentingan. Pemerintah desa berperan sebagai penggerak dan koordinator di tingkat lokal, Dinas Pariwisata sebagai perumus kebijakan dan pendamping, sementara masyarakat melalui Pokdarwis dan BUMDes menjadi pelaksana utama kegiatan pariwisata. Koordinasi antar aktor dilakukan melalui komunikasi aktif dan kerja sama yang bersifat fleksibel, sehingga pengembangan desa wisata tetap berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan waktu dan tenaga masyarakat menjadi hambatan utama, mengingat sebagian besar warga memiliki pekerjaan utama di luar sektor pariwisata. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan wisatawan, menyebabkan kualitas layanan yang diberikan belum sepenuhnya konsisten. Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi strategi adalah keterbatasan modal, belum optimalnya intensitas pelatihan, tingkat kekompakan masyarakat yang belum merata, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun strategi telah diimplementasikan dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas dan dukungan sumber daya masih menjadi kebutuhan utama.

4. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diimplementasikan serta memastikan kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan desa wisata. Menurut Fred R. David, evaluasi strategi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan organisasi bersifat dinamis, sehingga strategi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme program tahunan. Setiap program yang dilaksanakan dalam satu tahun dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan

pada tahun berikutnya. Sejak tahun 2022 hingga 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung secara konsisten melakukan evaluasi terhadap desa wisata untuk menilai perkembangan, tingkat komitmen pengelolaan, serta keberlanjutan pelaksanaan program.

Evaluasi strategi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang nyata. Salah satu bentuknya adalah penerbitan dan pembaruan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Desa Wisata. Desa wisata yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan atau tidak memiliki komitmen untuk dievaluasi kembali berpotensi dikeluarkan dari daftar desa wisata resmi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa evaluasi strategi digunakan sebagai instrumen pengendalian strategis untuk menjaga kualitas dan arah pengembangan desa wisata.

Di tingkat desa, Pemerintah Desa Lebakmuncang juga melakukan evaluasi secara berkala melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program. Evaluasi difokuskan pada indikator peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup warga. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program sekaligus mendorong munculnya inovasi baru guna meningkatkan daya saing Desa Wisata Lebakmuncang.

Selain evaluasi formal, proses evaluasi juga dilakukan secara partisipatif dan informal melalui masukan dari wisatawan dan masyarakat. Pokdarwis menjadikan tingkat kunjungan wisatawan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta saran dari wisatawan sebagai bahan evaluasi penting dalam penyempurnaan strategi. Tingginya tingkat kunjungan ulang wisatawan mendorong pengelola desa wisata untuk merancang inovasi, seperti rencana penyelenggaraan event tahunan “Hajat Tahunan”, sebagai upaya memperkuat daya tarik destinasi dan meningkatkan keberlanjutan desa wisata.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi masih belum terdokumentasi secara sistematis. Sebagian besar masukan masyarakat disampaikan melalui rapat desa, pertemuan warga, atau komunikasi informal dengan pengurus dan Pokdarwis. Kondisi ini menyebabkan tidak

seluruh aspirasi masyarakat tercatat dalam dokumen evaluasi resmi, sehingga berpotensi menghambat proses pembelajaran dan perbaikan strategi secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, evaluasi strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah berjalan secara berkelanjutan dan adaptif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas manajemen strategis, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi partisipatif yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem dokumentasi dan monitoring yang lebih sistematis agar strategi pengembangan desa wisata dapat terus disempurnakan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis pengembangan desa wisata telah dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka teori Fred R. David yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Secara umum, strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah memiliki arah yang jelas dan sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Pada tahap formulasi strategi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai landasan utama dalam merumuskan arah pengembangan. Strategi yang disusun bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan potensi serta karakteristik lokal Desa Lebakmuncang. Formulasi strategi juga menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan desa wisata. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan belum merata, sehingga strategi yang dirumuskan belum sepenuhnya merepresentasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahap implementasi strategi, pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat

sebagai aktor utama melalui pengelolaan atraksi wisata, homestay, kuliner, dan kerajinan lokal yang difasilitasi oleh Pokdarwis dan BUMDes. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pendamping, sementara pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak di tingkat lokal. Meskipun demikian, implementasi strategi masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, waktu, modal, serta sarana dan prasarana pendukung, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan dan konsistensi pelaksanaan program.

Pada tahap evaluasi strategi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui mekanisme program tahunan yang memiliki implikasi kebijakan nyata, termasuk penetapan dan pembaruan Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata. Evaluasi juga dilakukan di tingkat desa dengan menekankan indikator peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kualitas hidup warga, serta dilengkapi dengan masukan dari wisatawan dan masyarakat. Namun, proses evaluasi masih belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan partisipatif, sehingga belum seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan strategi ke depan, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fred R. David. (2011). *Strategic Management*.

Meloeng, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

JURNAL

- Deki, J. (2019). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYANG*. 8(4). <http://jurnafis.untan.ac.id>;<http://jurnal.fisipuntan.org>
- Siregar, S. D., Djuwendah, E., Rasmikayati, E., & Wiyono, S. N. (2020). PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP DESA WISATA LEBAKMUNCANG. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 542. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3266>
- Yakup, anggita permata, & Haryanto, T. (2019). *PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 23(2), 39.

DOKUMEN

- Pemerintah Daerah. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata*.
- Undang-Undang Nomor 10 (2009). *Tentang Kepariwisataaan*.